



Buletin Parlementaria

Nomor 965/IV/VI/2017 • Juni 2017

7TH
INDONESIA
KERJA
BERSAMA

Pallmanan
Jatibarang
Indramayu
1 Km

Pallkanci
Plumbon
Kanci
↓



**Sinergi DPR dengan Pers
Harus Terus Terjalin**

**Kenaikan Listrik Korban
18,7 Juta Konsumen**

**Kasus Memilukan
Brexit Jangan
Sampai Terulang**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Kasus Memilukan Brexit Jangan Sampai Terulang

Peristiwa memilukan yang terjadi pada pelaksanaan mudik tahun 2016 masih terbayang jelas dalam ingatan.

Kejadian di Pinto Tol Brebes Timur (Brexit) telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu Komisi V DPR RI melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan segala persiapan yang telah dilakukan oleh beberapa *stakeholder* terkait persiapan arus mudik tahun 2017.

“Peninjauan kami ini dengan melibatkan semua stakeholder. Hal itu dalam rangka pelaksanaan mudik Lebaran 2017. Kami berharap apa yang dialami pada tahun 2016 lalu tidak terulang kembali, apalagi sampai memakan korban jiwa,” ucap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/06/2017).

Michael mengatakan, ada solusi yang telah dilakukan guna mengurangi kemacetan yang mungkin terjadi, baik di Gerbang Tol Brebes Timur maupun di Pejagan. Seperti diketahui, pada tahun 2016 lalu kemacetan parah terjadi di pintu Tol Brebes Timur sepanjang 15 km, sedangkan di Pejagan mencapai 41 km.

“Salah satu solusinya yaitu dengan melalui jalur fungsional yang merupakan jalan alternatif, sehingga masyarakat tidak akan menumpuk pada satu alternatif jalan saja, tetapi ada alternatif lainnya,” ujarnya.



sumber <https://3.bp.blogspot.com>

la juga menyatakan, setelah dilakukan uji coba perjalanan, ternyata jalur fungsional tersebut dapat memberikan solusi bagi para pemudik di tahun 2017.

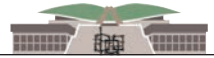
“Meskipun masih banyak kekurangan, seperti masalah penerangan dan rambu-

rambu jalan, tetapi pihak Kementerian Perhubungan beserta Korlantas akan membantu memberikan arahan. Memang jalur ini belum permanen, sehingga daya tempuh kecepatan kilomernya pun masih 40 km per jam,” jelasnya. ■

(dep.mpt, foto : devr/htc)



Tim Kunspek Komisi V DPR berfoto bersama mitra kerja, usai meninjau jalur fungsional jelang mudik lebaran 2017 di Jateng



Ketua DPR Setya Novanto melepas 50 Mobil Sembako yang akan disalurkan di wilayah Jakarta

Ketua DPR Lepas 50 Mobil Sembako

Ketua DPR RI Setya Novanto resmi melepas 50 mobil box yang membawa 25 ribu paket sembako untuk didistribusikan kepada masyarakat di seluruh Jakarta. Ini bagian dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Bulan Suci Ramadan.

Negara kita, masih menyisakan masalah sosial, di antaranya soal kemiskinan. Dan ummat Islam jadi mayoritas di tengah kemiskinan itu. "Jadi keniscayaan bila ekonomi ummat Islam dibangun," ujar Novanto, saat memberi sambutan di lapangan sepak bola kompleks DPR RI, Jumat (16/6).

Acara bertajuk "Golkar Berzakat" itu dihadiri pimpinan F-PG DPR RI dan Endang Maria Astuti sebagai penanggung jawab acara. Novanto sendiri mengungkapkan, kantong-kantong kemiskinan di Jakarta masih banyak. Ia mengaku, kerap berkeliling kota Jakarta malam hari dan melihat begitu banyak orang-orang miskin tidur di emperan jalan dan gerobak.

Novanto tak segan-segan membangunkan orang-orang miskin itu di tengah malam dan memberi bantuan. Dalam sambutannya, Novanto juga mengapresiasi acara ini sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi ummat. ■

(mh,mp). Foto: Azka/hr

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Sinergi DPR dengan Pers Harus Terus Terjalin

Ketua DPR Setya Novanto berpidato saat acara buka puasa bersama para Pemred media massa



Ketua DPR Setya Novanto mengakui, kedekatan dengan media massa memberikan arti tersendiri bagi DPR, terutama dalam mempublikasikan kinerja DPR. Apalagi, jumlah wartawan yang sehari-hari meliput di DPR cukup banyak.

“Wartawan ada 250 orang lebih yang meliput di DPR, Karena itu saya berharap media yang menjadi pilar keempat demokrasi, ikut berperan aktif dalam menjaga negara ini,” ujar Setya Novanto saat menyampaikan sambutannya dalam acara buka puasa bersama para pemimpin redaksi (pemred) media massa dan wartawan di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Karena itu, Ketua Umum Partai Golkar itu berharap, kekompakan dan sinergi dengan media massa dapat terus terjalin, bahkan dia berjanji, akan terbuka dengan berbagai masukan dari wartawan terkait pelayanan yang diberikan DPR dalam memberikan akses peliputan.

“Kita layani sesuai kemampuan kita, karena ini rumah kita bersama. Tugas kita bersama,” ujar Setnov, seraya menambakan bahwa acara buka bersama dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara DPR dengan media, khususnya para pemred.

Ia mengaku senang karena silaturahmi dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. “Bertemu dengan wartawan di acara buka bersama dalam suasana penuh keakraban pada bulan Ramadan penuh berkah. Semoga silaturahmi ini dapat terus dilaksanakan, kerja sama lebih baik,” terangnya.

Dalam acara yang dipandu pembawa acara mantan anggota DPR Dedi Gumelar (Miing Bagito), Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV Yogi Sadarahmat menyarankan agar para anggota Dewan memberikan akses tambahan kepada awak media.

Sebab sejauh ini informasi yang didapat umumnya masih bersifat permukaan yang dangkal. Ia mencontohkan soal pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut dan Pansus Hak Angket untuk KPK yang banyak ditentang publik.

“Bila ada inside-inside story, sekalipun hanya berupa background, itu akan sangat bermanfaat bagi pengetahuan para wartawan,” ujar Yogi. Kalau pun ada informasi yang sensitif, lanjutnya, tak ada salahnya tetap disampaikan dengan catatan tidak untuk disiarkan.

“Dengan penyampaian informasi lebih, para wartawan dan redaktur yang mengolah informasi dapat memahami betul konteks sebuah isu atau peristiwa,” kata Yogi menambahkan. ■



Wakil Ketua DPR Tutup Bazar dan Pasar Murah PIA DPR RI

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi pengurus PIA DPR memberikan bingkisan untuk wartawan

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi terselenggaranya Bazar dan Pasar Murah oleh ibu-ibu PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam rangka penutupan bazar tersebut di Lobi Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (15/6).

“Saya bangga dan salut atas terselenggaranya bazar dan pasar murah ini oleh ibu-ibu PIA DPR RI. Terlebih lagi di saat Ramadhan dan mendekati Idul Fitri kali ini, dimana tingkat kebutuhan masyarakat meningkat, tentu adanya pasar Murah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pegawai dan karyawan-karyawati di DPR RI ini. Oleh karena itu saya sangat

mengapresiasinya,” ujar Fadli Zon.

Di tengah-tengah acara tak lupa politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mendatangi beberapa stand. Bahkan di salah satu stand, Fadli tertarik dengan salah satu baju bermotif etnik salah satu daerah. Tidak menunggu lama, ia pun langsung membawa pulang baju tersebut setelah mengeluarkan sejumlah rupiah.

Dalam kesempatan itu Ketua

PIA DPR RI, Deisti A. Novanto juga mengungkapkan apresiasinya kepada teman-temannya sesama isteri anggota DPR RI yang tergabung dalam PIA DPR, tentunya beserta seluruh Tim, karena sudah bekerjasama dengan baik selama tiga hari berturut-turut. Hingga kemudian berhasil menggelar acara tersebut.

Pada kesempatan itu Deisti yang ikut didampingi oleh Wakil Ketua PIA DPR RI, Grace Fadli Zon, Ista Agus Hermanto serta Ketua Panitia Julie Lasikodat melaporkan bahwa dalam acara tersebut melibatkan 80 pengusaha kecil menengah dengan berbagai produknya. Seperti baju, sepatu, tas, aksesoris rumah tangga dan asesoris wanita, hingga makanan.



“Tidak hanya itu di acara peliputan penutupan bazar kali ini, sepuluh fraksi yang ada di DPR juga menampilkan berbagai tarian tradisional dari daerah-daerah yang berlainan,” ujar Deisti.

Di akhir acara PIA juga mengundi *doorprize* dengan berbagai hadiah menarik. Selain itu, tak lupa PIA juga memberikan sejumlah paket sembako kepada beberapa karyawan, serta wartawan yang selama ini ikut mendukung kegiatan PIA melalui peliputannya. Deisti berharap agar kekompakan dan kebersamaan anggota PIA dapat terus terjalin dengan baik, sehingga semakin banyak hal sosial yang bisa dilakukan oleh PIA ke depannya. ■

(ayu/mp), foto: kresno/hr

Persiapkan Manajemen Lebih Baik, Kasus Brexit Jangan Terulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menekankan, menghadapi arus mudik lebaran yang makin dekat ini maka pemerintah diminta mempersiapkan manajemen lalu lintas yang lebih baik. “Persiapan sudah dilakukan berbagai instansi Kemenhub, KemenPUPR dan kepolisian sudah cukup ketat. Namun karena ini even besar, sudah pasti beberapa tempat banyak kedodoran,” katanya saat diminta tanggapannya di ruang kerjanya lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Kamis (15/6/2017).

Karena itu lanjut Agus, pihaknya sudah minta pihak Jasa Marga, bahkan Menteri PUPR, dan Menteri Perhubungan jangan sampai terulang kasus Brexit (Brebes Exit), apalagi sekarang jalan tol sudah sampai Weleri.

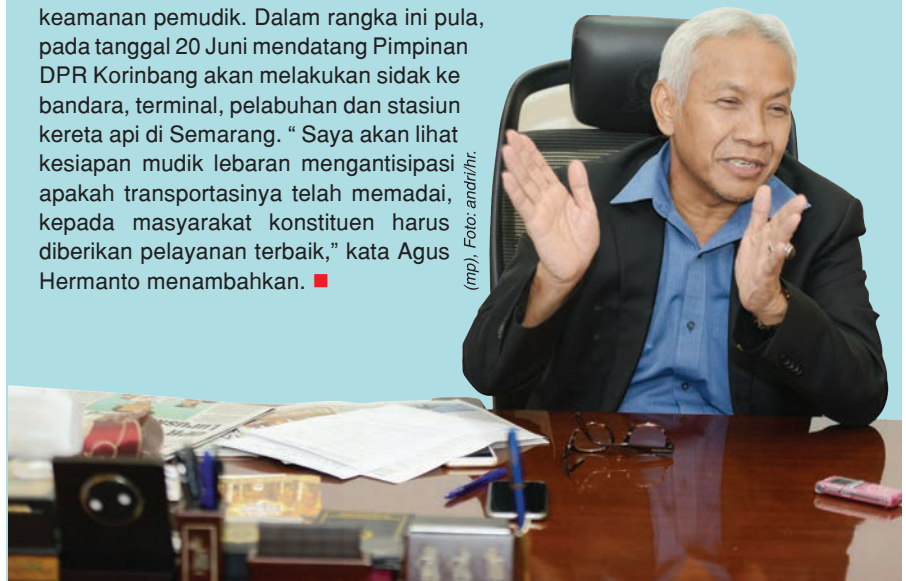
Wakil Ketua DPR Korinbang ini menekankan, karena jalan tol sudah sampai Weleri, maka jangan semuanya keluar di lokasi itu dan terjadi kebuntuan (stag). Bahkan kalau perlu mulai Cirebon sudah diatur, kemudian beberapa lokasi ke timur lagi termasuk Pemalang. Sebelum terjadi kemacetan panjang sudah bisa diurai dari kota-kota yang dilalui tol sebelum Semarang.

Ia memprediksi, peluang macet masih ada sebab penambahan jalan-jalan belum memadai dibanding jumlah kendaraan yang akan mudik. Namun yang bisa meredusir adalah mengurangi dampak kemacetan dan bisa dilakukan oleh baik kepolisian dan perhubungan sehingga bisa terurai dan berjalan lebih lancar.

“Manajemen lalu lintas harus jitu tidak semua keluar Weleri atau Brebes, tapi sudah dimulai dari Cirebon sudah diatur sehingga masuk ke kota Semarang. Mudah-mudahan dengan manajemen lalu lintas yang baik bisa teratasi,” terang Agus.

Dari sisi keamanan, polri diharapkan mempersiapkan personilnya dan perlu personil TNI untuk membantu kelancaran dan keamanan pemudik. Dalam rangka ini pula, pada tanggal 20 Juni mendatang Pimpinan DPR Korinbang akan melakukan sidak ke bandara, terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api di Semarang. “Saya akan lihat kesiapan mudik lebaran mengantisipasi apakah transportasinya telah memadai, kepada masyarakat konstituen harus diberikan pelayanan terbaik,” kata Agus Hermanto menambahkan. ■

(mp), Foto: andri/hr



Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Agus Hermanto

Pemerintah Diminta Tetap Lanjutkan Program Rastra Tahun 2017

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tetap melanjutkan program Rastra (beras sejahtera) Tahun 2017 sesuai dengan kesimpulan/ keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Direktur Perum Bulog (badan urusan logistik) pada 4 April 2017, yakni sebanyak 12 kali penyaluran hingga bulan Desember 2017.

“Ada surat dari Kementerian Pertanian yang ditujukan kepada Bulog untuk tidak menyalurkan beras selama enam bulan ke depan (sejak Juli sampai Desember 2017). Dari sana, tentu ada dampak yang ditimbulkan. Pertama rakyat (14,3 juta rumah tangga sasaran/ RTS) tidak akan menerima Rastra atau Raskin. Apakah BPNT (Bantuan pangan non tunai) bisa menggantikannya? BNPT sendiri harus dievaluasi karena serapannya rendah, penyalurannya juga masih belum efektif. Ini tentu akan berdampak pada Bulog itu sendiri. dengan ditahannya beras selama enam bulan, maka tentu in and out nya beras jadi tidak berjalan (tidak keluar), maka ini akan berdampak pada kondisi kualitas beras. Beras akan menjadi rusak. Kalau beras Bulog rusak, Bulog akan rugi. Seperti dikatakan direktur utama Bulog, Pak Djarot tadi, hanya ada 2 hal yang bisa dilakukan Bulog jika berasnya rusak. Pertama re-processing, dan yang kedua beras adalah dijual untuk pakan ternak. Tentu di sini harga jual beras bulog yang rusak akan sangat rendah,” papar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

Padahal, lanjut Herman, Bulog sebagai Perum (perusahaan umum) juga sangat patuh terhadap UU BUMN, salah satunya Bulog sebagai BUMN tidak boleh rugi, harus untung. Kalau kemudian ada kerugian dari Bulog yang disengaja, tentu Bulog akan terkena masalah.

Namun, yang terpenting dari itu menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, pihaknya akan tetap konsisten menjalankan setiap kali keputusan yang sudah diputuskan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya (pemerintah dan bulog), dalam siklus anggaran. Dalam UU APBN harus dipatuhi bersama.

“Kalaupun ada inovasi atau perubahan, tentu bisa dibicarakan dengan baik bersama DPR, melalui Raker atau RDP. Oleh karena itu kami meminta apa yang sudah menjadi keputusan tentang program rastra itu harus tetap dilaksanakan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memberikan bantuan pangan nontunai (BPNT) berbentuk kartu program Presiden Joko Widodo. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan menghentikan distribusi program rastra per 1 Juli 2017 mendatang. Setelah itu tidak ada lagi rastra kepada masyarakat kurang mampu. ■

(ayu.mp). Foto: Kresno/hr

Anggaran ORI Jauh Dari Memadai

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, menilai, peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menangani permasalahan pelayanan publik sudah sangat maksimal, namun ia menyayangkan anggaran yang tidak memadai disamping luasnya pekerjaan ORI.

“Kalau lihat anggaran yang disetujui itu masih sangat jauh dari memadai, padahal selama ini kami mengamati apa yang dilakukan ORI sudah sangat maksimal dan sesuai posisinya sebagai Ombudsman, memverifikasi atau mengklarifikasi setiap aduan masyarakat mengenai pelayanan publik,” terang Zainudin usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), kepala Lembaga



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kepala ORI, Kamis (15/6) di Jakarta.

Maka dari itu, Komisi II akan berusaha meningkatkan anggarannya ORI agar mereka (ORI) dapat bekerja lebih maksimal lagi, dan pelayanan publik dapat terawasi dengan baik. "Kita harus tingkatkan supaya mereka bisa bekerja lebih maksimal lagi, DPR khususnya Komsis II mendukung ORI,"

tandasnya.

Dalam rapat juga menghasilkan kesimpulan mengenai pagu indikatif R-APBN tahun 2018 yang dibacakan oleh politisi fraksi Golkar itu, yaitu anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp 129.238. miliar.

Selain itu anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp 652.878. miliar. Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar

Rp 291.744. miliar dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp 186.846. miliar.

"Ini akan kami bawa ke Banggar dengan mengundang bapak-bapak semua, kita akan berjuang membantu meningkatkan anggaran"katanya. ■

(ria.mp), Foto: Jayedil/hr

Fasilitas RS Saiful Anwar Malang Cukup Memadai

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang, guna melakukan pengawasan program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR dan keluarganya. Ini sesuai Perpres No. 68 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan keluarganya, serta aturan pelaksanaan oleh PT Jasindo berdasarkan Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenku No. 167 Tahun 2014.



Tim Kunspek BURT DPR meninjau RS Saiful Anwar di Kota Malang

Usai meninjau RS tersebut, Ketua Tim Kunspek Elva Hartati menilai, fasilitas RS ini sudah cukup memadai untuk memberikan layanan kesehatan bagi para Anggota DPR RI dan keluarganya.

"Untuk di daerah Malang, RS ini sudah memadai. Kita berharap pemegang kartu Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bisa terlayani dengan baik," kata Elva (F- PDI Perjuangan) di RS Saiful Anwar, Malang, Rabu (14/6).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar dengan mengatakan, tujuan kunjungan spesifik BURT ke Kota Malang untuk melihat sejauh mana tingkat pelayanan RS Saiful Anwar dalam memberi pelayanan kepada pejabat negara termasuk di dalamnya Anggota DPR.

Usai mendengar pemaparan langsung dari Direktur rumah sakit dan meninjau langsung rumah sakit provider yang menjadi mitra PT Jasindo, politisi PPP itu menilai fasilitas rumah sakit tersebut sudah memadai.

"Saya tanya ada tidak daftar nama anggota DPR beserta keluarga, ternyata datanya lengkap. Kamar VVIP untuk anggota juga ada. Jadi sebagai rumah sakit rujukan bagi pejabat negara ini bagus dan cukup memadai,"tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut ikut serta Ribka Tjipyaning (PDI-Perjuangan) Andi Fauziah (F- Golkar), Rita Zahara (Gerindra) Kuswiyanto (F-PAN), Agung Budi Santoso (F-Demokrat) Syaiful Bahri Ansori (F-PKB), serta Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem). ■

(ria.mp), Foto: Ria/hr



Tim Kunspek Pansus Pelindo II meninjau Pelabuhan Terminal Teluk Lamong, Surabaya

Pansus Pelindo II Bandingkan New Priok Dengan Teluk Lamong

Dalam kunjungan kerja spesifik Pansus Pelindo II di pelabuhan Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Kamis (15/6), Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Tim kunspek melakukan perbandingan terkait penerbitan global bond (surat utang bervaluta asing) untuk membangun pelabuhan baru.

“Kami datang ke Teluk Lamong untuk melakukan perbandingan, karena Teluk Lamong dibangun dengan pola pendanaan dari global bond tahap pertama yang menghabiskan biaya sebesar 5 triliun. Sementara tahap pertama di New Priok butuh 11 triliun dengan kapasitas yang hampir sama 1,5 juta teus” katanya.

Lebih lanjut politisi fraksi PDI Perjuangan mengatakan, terkait temuan

pansus tahap kedua ini hasilnya akan kami serahkan kepada BPK dan KPK. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat internal bahwa hasil audit BPK akan diserahkan kepada KPK dan segera dilakukan persidangan.

Selain berdialog langsung dengan Dirut serta jajaran pejabat pelabuhan Teluk Lamong tim Pansus juga berkesempatan melakukan tinjauan lapangan ke pelabuhan. “Kami mengapresiasi

pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Teluk Lamong. Alat-alatnya lebih canggih daripada New Priok milik Pelindo II” pungkasnya.

Di tempat yang sama direktur Utama PT Pelindo III, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, pihaknya menerima beberapa evaluasi yang disampaikan oleh Pansus DPR dan menilai masukan yang disampaikan akan ditindaklanjuti demi kemajuan Pelindo II menjadi lebih baik. ■

(rel/mp). Foto: Arief/hr

Manajemen PT Pelindo II Perlu Ditata Lebih Baik

Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR Teguh Juwarno, mendorong Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo II) bisa lebih baik penanganannya dalam menata tata kelola manajemen perusahaan.

Hal tersebut diungkapkan setelah tim Pansus Pelindo II meninjau langsung pelabuhan, menurutnya pelabuhan teluk bayur masih diperlukan penataan yang lebih baik.

“saya menginginkan perbaikan secara lebih serius untuk bisa meningkatkan kualitasnya,” ujarnya saat mengunjungi Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Kamis (15/6).

Kepada Tim Pansus Pelindo II, manajemen Pelabuhan Teluk Bayur menjelaskan bahwa kapasitas bongkar muat peti kemas di sini pertahunnya baru bisa trealisasi sebesar 34 hingga 35 persen. Melihat kondisi ini, Tim Pansus berharap kapasitas bongkar

muat itu harus ditingkatkan. Untuk itu saya meminta agar di pelabuhan ini mempunyai tata kelola yang baik yang didukung dengan peningkatan manajemen yang baik pula.

“Saya meminta komitmen manajemen untuk bisa memberikan tata kelola yang baik di Pelabuhan Teluk Bayur ini,” pintanya.

Dilihat dari sejarah ungkap politisi dapil Jawa Tengah IX pelabuhan di sini adalah pelabuhan konvensional, umurnya sudah puluhan tahun, yang menjadi kebanggaan masyarakat Padang.

Hal senada di sampaikan Anggota Pansus Pelindo II Jhon Kenedy Azis terkait pengelolaan di Teluk Bayur, menurutnya sangat menyedihkan, bagaikan gudang

sangat kurang teratur. Untuk mengatasi persoalan tersebut,

“Saya meminta kepada manajemen Pelindo II supaya tata kelola ruangnya agar dirapikan sehingga tertata dengan baik”. ucapnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, walaupun di pelabuhan ini tidak ada pelabuhan angkutan penumpang, tetapi di sini ada pelabuhan curah, peti kemas dan pelabuhan cair. Yang perlu di perhatikan keindahannya, kebersihan, visualnya harus tetap terjaga.

Direktur Teknik Informasi Dani Rusli menjelaskan tentang gambaran kegiatan di pelabuhan Pelindo II mencakup 12 pelabuhan diantaranya layanan Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat

Di setiap pelabuhan, kata Rusli ada empat terminal yaitu curah cair, peti kemas, general cargo, curah kering. Di tambahan pelabuhan Telukbayur mempunyai luas lahan 95 Hektar panjang dermaga 1.350 meter dan bisa menampung peti kemas sebanyak 6.000 hingga 30.000 meski kedalamannya sangat rendah.

“Kami manajemen sedang membangun perbaikan atau peremajaan dermaga dengan nilai investasi senilai 100 Miliar, untuk peningkatan kapasitas,” tutupnya. ■

(rni/mp), Foto: Runi/hr



Tim Kunspek Pansus Pelindo II meninjau Pelabuhan Teluk Bayur Padang

RUU Ponpes dan Madrasah Kembali Disuarakan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah kembali disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di hadapan Menteri Agama. Pentingnya menyuarkan kembali RUU ini, lantaran Ponpes dan Madrasah dirasa kurang mendapat perhatian pemerintah.



Pimpinan Komisi VIII DPR RI

Kementerian Agama juga sangat minim mengalokasikan anggaran untuk dua lembaga Pendidikan ini. Untuk itu, sangat mendesak segera digulirkan pembahasan RUU ponpes dan madrasah. “Pesantren, kok, tidak ada aturannya. Kebutuhan anggaran untuk Ponpes dalam hitungan saya mestinya Rp1-5 triliun. ini untuk mengangkat derajat Ponpes,” tegas Ali saat memimpin rapat kerja dengan Menag Lukman Hakim Saifudin, Kamis (15/6).

Sebelumnya diskursus mengenai pentingnya RUU tersebut sempat terlontar beberapa waktu lalu. Selama ini, sangat timpang alokasi anggaran dan sarana prasarana untuk ponpes dan madrasah. Negara dinilai belum hadir untuk keduanya. Saatnya memberi perhatian lebih pada Ponpes dan madrasah.

“Oleh karena itu menurut saya harus segera dipikirkan RUU Ponpes dan madrasah. Anggaran ponpes dan madrasah sampai Rp 5 triliun merupakan sebuah kebutuhan. Paling tidak tahun depan kita bicarakan agak serius mengenai ini,” harap politisi PAN tersebut. ■

(mh,mp), Foto: Azka/hr

Program Sekolah Lima Hari Jangan Diwajibkan

Wakil ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengungkapkan kebijakan program penguatan karakter lima hari belajar perminggu pada tahun 2017/2018 yang diinginkan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) harus bersifat pilihan, bukan sesuatu yang wajib, sehingga tidak harus dipaksakan seluruh sekolah.



Wakil ketua Komisi X DPR Ferdiansyah (tengah)

Untuk Majukan PT Tidak Bisa Diberikan Kebijakan Sama

Dalam rangka Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), Komisi X DPR RI mengunjungi Kota Balikpapan Kalimantan Timur tepatnya di Aula Universitas Balikpapan, Kamis (15/6).

Dalam pertemuan tersebut hadir Perwakilan dari Asisten Gubernur Kalimantan Timur bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Meliana, Koordinator Kopertis Universitas Balikpapan Idianur dan Asisten I Walikota Balikpapan Saiful Bahri. Selain itu hadir juga perwakilan dari PTN/PTS dan Politeknik yang ada di Balikpapan.

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, untuk memajukan Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa diberikan kebijakan yang sama. "Tidak bisa universitas yang berakreditasi A disamakan kebijakannya dengan yang berakreditasi B karena memiliki

"Memajukan Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa diberikan kebijakan yang sama. Tidak bisa universitas yang berakreditasi A disamakan kebijakannya dengan yang berakreditasi B"

kualifikasi dan tahapan tertentu. Nantinya penanganan terhadap universitas itu berbeda-beda," cetusnya.

Menurut Ferdi-panggilan akrab Pimpinan Komisi X dari FPG ini, nantinya akan ada perlakuan khusus atau memihak

“Rencana ini perlu dikaji secara komprehensif (mendalam), mempersiapkan waktu yang cukup dan melakukan sosialisasi,” kata Ferdi saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja (Raker) dengan Mendikbud di Gedung Nusantar I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/06).

Ferdi juga meminta Mendikbud memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. "Jangan sampai ini memberatkan masyarakat/orang tua/ anak didik serta tidak menambah anggaran. Perlu ada target yang jelas dalam setiap tahapan," ujarnya.

Selain itu, lanjut politisi F-Golkar, Komisi X DPR meminta Kemendikbud RI untuk mengusulkan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2018 untuk perbaikan ruang kelas rusak sesuai dengan rekomendasi Panja Sarpras Dikdasmen Komisi X DPR RI.

Komisi X DPR RI juga meminta Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan turunan peraturan perundang-undangan terhadap UU No.

33 Tahun 2009 tentang perfilman, UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan melakukan sosialisasi secara masif.

Sebagai bentuk pemajuan kebudayaan, Komisi X DPR mengharapkan Kemendikbud RI melakukan pengkajian atas adanya wacana penyusunan RUU tentang Permusikan

Sebelumnya, dalam rapat kerja (Raker) dengan Kemendikbud RI menyampaikan kebijakan penganggaran TA adalah memberikan perhatian yang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas nasional bidang pendidikan yang tertuang dalam RKP 2018 yaitu penguatan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Mendukung program prioritas nasional di bidang lain melalui penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Serta penguatan penjaminan mutu pendidikan yang menjadi kewenangan pemnuh Pemerintah Pusat. ■



Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah

terhadap PT agar tidak ada ketertinggal standar nasional pendidikan. "Ini merupakan alasan Komisi X membentuk Panja Standar Nasional Perguruan Tinggi antara lain dimaksudkan untuk melihat masalah-masalah utama yang ada. Ini bertujuan agar tidak ada jarak standar nasional yang terlalu jauh antara Perguruan Tinggi di Indonesia," kilang politisi Dapil Jabar tersebut.

Untuk itu dia berharap, kedepan ada pemetaan agar disiapkan kebijakannya sesuai kondisi geografis dan masyarakat yang ada, namun kebijakan secara umumnya harus sama. Pihaknya juga meminta Kemenristek Dikti untuk mendata ulang mana saja Prodi yang sudah jenuh, mana saja yang dibutuhkan saat ini dan mana yang peminatnya sedikit namun perlu didukung agar dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat dan dunia kerja.

Tim Kunspek Komisi X DPR memilih Kalimantan Timur karena menurutnya daerah ini memiliki potensi pengembangan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang cukup baik. Ikut serta dalam kunjungan kali ini, Marlinda Irwanti, Ridwan Hisjam, Anita Jacoba Gah, Arzeti Bilbina, Lathifa Shohib, Ledia Amaliah dan Dony Ahmad. ■

Pemerintah Jangan Anak Tirikan Perguruan Tinggi Swasta

Penjamin mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan standar pendidikan tinggi. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik Abdul Fikri Faqih menegaskan pentingnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga berdampak peningkatan mutu peserta didik.



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (tengah)

Dalam kunjungan tersebut juga menyoroti keluhan dari PTS yang masih mendapatkan akreditasi C sehingga banyak mahasiswanya yang ditolak dalam mencari kerja meskipun memiliki Indeks Prestasi (IP) 3,5. “Kita akan mendiskusikan dengan Menteri Ristek dan Dikti sehingga mutu mereka tidak dinilai dari IP atau lembaga (kampus) tersebut sehingga industri tidak berpatokan pada akreditasi kampus untuk menerima pekerja,” ujar Abdul Fikri di Semarang, Kamis (15/6).

Politisi PKS Dapil Jateng tersebut juga meminta pemerintah untuk memperhatikan fasilitas kampus tidak hanya bangunan, juga laboratorium untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa bidang teknik dan bahasa.

Sementara itu anggota Komisi X DPR Laila Istiana menyoroti kurangnya perhatian

pemerintah dalam memperhatikan perguruan tinggi swasta. Jumlah kampus swasta di Jawa Tengah ada 254 kampus dan hanya memiliki perguruan tinggi negeri 6 “Didirikannya PTS dan PTN itu memiliki cita-cita yang sama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Komisi X sudah berkali-kali menyampaikan ke pemerintah supaya ada garda yang

mengurus sarana prasarana PTN dan PTS tapi pemerintah masih keukeuh tidak ada anggaran untuk sarana prasarana padahal itu sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Laila juga menyoroti kesenjangan antara PTN dan PTS, ia minta agar swasta tidak merasa dianak tirikan padahal peran PTS sangat penting dan sangat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak juga PTS yang membantu mahasiswa tidak mampu dan paling banyak menerima peserta didik dibandingkan PTN.

Turut serta dalam kunjungan kunspek Komisi X ini Laila Istiana, Asdy Narang, Sofyan Tan, Wiryanti Sukamdani, Esti Wijaya, Irene Yusiana, Popong Odje D, Dwita Ria Gunadi, Mujib Rohmat, dan Anang Hermansyah. ■

(rh.mp), Foto: Rivan/hr



Sumber <https://commons.wikimedia.org>

Pansus Sepakati Distribusi 15 Kursi Tambahan DPR

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Pemilihan Umum (Pemilu) bersama pemerintah menyetujui distribusi penambahan 15 kursi DPR.

Setelah melalui pembicaraan yang cukup alot dan forum lobi, disepakati penambahan kursi tersebut diperuntukkan pada 10 daerah pemilihan (dapil), yakni Sumatera Utara (1 kursi), Riau (2 kursi), Kepulauan Riau (1 kursi), Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 Kursi), Kalimantan Utara (3 Kursi), Sulawesi Utara (1 Kursi), Sulawesi Barat (1 kursi), Sulawesi Tenggara (1 Kursi), dan Nusa Tenggara Barat (1 Kursi).

“Distribusi 15 kursi ini kita setuju antara pansus dan pemerintah,” ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy

diiringi ketukan palu di Ruang Pansus RUU Pemilu, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Selanjutnya, menurut Lukman, irisan dapil di daerah tersebut akan diatur lebih lanjut pada forum Tim Sinkronisasi (Timsin). Alotnya pembahasan distribusi 15 kursi karena tidak semua fraksi menyetujui simulasi pemerintah. Fraksi-fraksi menganggap simulasi sebaran 15 daerah yang ditawarkan pemerintah belum memenuhi kriteria penambahan kursi, yakni berdasarkan jumlah penduduk dan soal kemahalan kursi, khususnya Kalimantan Barat yang awalnya hanya

ditambah satu kursi. Padahal, dalam pembahasan sebelumnya, Kalbar harus mendapat alokasi dua kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.

Sementara itu, terkait 4,7 juta warga Indonesia yang berada di luar negeri akan dijadikan penghitungan untuk menata dapil di DKI. Meskipun, sebelumnya suara pemilih luar negeri sudah masuk ke dalam administrasi DKI 2 (Jakarta Pusat & Jakarta Selatan), namun jumlah WNI di luar negeri tidak dihitung sebagai salah satu faktor penataan dapil, yakni berdasarkan jumlah penduduk, sehingga suara mereka disisipkan di Jakarta Pusat. Pemilihan Jakarta Pusat karena semua administrasi WNI yang ada di luar negeri ada di Pejambon (Kemenlu).

Nantinya, sambung Lukman, suara mereka akan tetap dimasukkan ke dalam dapil DKI 2 (Jakarta Pusat). Sementara, kontribusi suara Jakarta Selatan akan dilempar ke dapil lain. “Jadi, dapil DKI 2 pemilih luar negeri lebih dominan, atau Jakarta Pusat yang menyempil ke luar negeri,” tandas politisi dari F-PKB ini. ■

(ann.mp). Foto: Kresno/hr



Suasana Rapat Pansus tentang RUU Pemilu dengan pemerintah

RAPBN 2018 Diminta Realistis dan Berdampak Bagi Masyarakat



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah untuk meyakinkan asumsi dasar ekonomi yang tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 berada dalam kisaran realistis dan dapat memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi. Demikian disampaikan saat rapat kerja pembahasan asumsi dasar RAPBN 2018 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Diketahui, dalam RAPBN pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dengan rentang 5,4%-6,1%, Besaran tersebut dianggap ambisius jika dibandingkan dengan realisasi dalam dua tahun terakhir. Hal lain seperti inflasi diperkirakan sebesar 3,5 - 1,0%, nilai

tukar (kurs) Rp 13.500 - Rp13.800 per USD, suku bunga SPN 4,8%-5,6%.

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45 - USD 60 per barel. Untuk lifting migas mencapai 1.965 - 2.050 ribu barel per hari (bph), dengan rincian lifting minyak bumi sekitar 771 ribu - 815 ribu bph, dan gas bumi sekitar 1.194 - 1.235 ribu barel setara minyak per hari.

"Kami meminta pemerintah meyakinkan Komisi XI DPR terkait dengan asumsi dasar RAPBN 2018, oleh karena itu, kami persilakan Menkeu, Menteri PPN, Gubernur BI dan Kepala BPS untuk memberi penjelasan," kata Mekeng.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penetapan range asumsi dasar RAPBN 2018 didasari oleh adanya

"RAPBN pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dengan rentang 5,4%-6,1%, besaran tersebut dianggap ambisius jika dibandingkan dengan realisasi dalam dua tahun terakhir"

pemulihan optimisme perekonomian global yang telah dirilis oleh beberapa lembaga salah satunya IMF. "Ini didorong oleh perekonomian global yang membaik seperti Amerika dan Eropa," kata Sri Mulyani.

Untuk pertumbuhan ekonomi di 2018 yang ditetapkan rata-rata 5,4% - 6,1%, kata Sri Mulyani juga akan didorong oleh tiga faktor yakni konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. "Konsumsi dengan menjaga inflasi tetap rendah, apalagi persiapan untuk kegiatan Asian Games dan pemilu yang akan ada peningkatan permintaan barang dan jasa," sambungnya.

Sedangkan investasi akan mengandalkan yang berasal dari non fiskal, yaitu perbankan, pasar modal seiring dengan perbaikan iklim investasi Indonesia serta peningkatan peringkat utang menjadi investment grade.

"Untuk bisa capai itu di bidang konsumsi dijaga dengan didorong inflasi rendah. Investasi kunci membuat pertumbuhan tinggi dengan sumber investasi non pemerintah cukup berarti," tutup Sri Mulyani. ■

(ns/sc), Foto: Andri/hr

Sekjen DPR Terima DPRD Banyumas

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR Satyanto Priambodo mengatakan, hak keuangan administrasi Pimpinan, dan Anggota DPRD ditanyakan Delegasi DPRD Banyumas saat mengunjungi Setjen DPR, Rabu (14/6/2017).

Menurut Nanang-panggilan akrab Karo Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR ini yang didampingi Sekjen DPR Ahmad Djuned, masalah yang ditanyakan DPRD Banyumas ini, banyak juga ditanyakan oleh DPRD kabupaten/kota lain. "PP No.18 tahun

2017 mengenai hak keuangan memang sudah ditunggu lama oleh seluruh anggota DPRD provinsi / kabupaten di Indonesia," ujarnya.

Mereka (para anggota DPRD), lanjut dia, ingin memastikan kedudukan protokolernya, termasuk pejabat daerah atau bukan. Karena sudah jelas PP itu

menyebutkan bahwa anggota DPRD menjadi unsur dari pemerintah atau pejabat daerah.

Sebagai pejabat daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPRD diberikan hak-hak keuangan. Dalam PP 18, banyak hal yang disetarakan dengan eksekutif yang ada



Sekjen DPR Achmad Juned didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR Satyanto Priambodo

di daerah. Dengan dikeluarkannya PP 18 tahun 2017, menjadi pijakan baru secara politik buat anggota DPRD di Indonesia.

Ia tidak mengelak, dengan keluarnya PP ini harus ada penyesuaian anggaran di masing-masing daerah. Karena fungsi PP ini adalah membuat kesetaraan yang sama seluruh provinsi di Indonesia disesuaikan kemampuan masing-masing daerah. "Masalah nanti ada pergeseran anggaran, tentunya Pemda lebih memahami. Inilah peranan Pemda menyikapi PP 18 tersebut," katanya.

Dalam kesempatan ini anggota Komisi A DPRD Banyumas Sjaifuddin

mengatakan, PP No.18 baru terbit 2 Juni lalu sehingga ini perlu ada rapat koordinasi antar pimpinan fraksi dan eksekutif terkait penyesuaian anggaran termasuk tunjangan rees ini menjadi tunjangan pendapatan.

"Hal ini akan kami bawa di rapat internal di daerah, seperti apa nanti keputusannya, ini menjadi kewenangan Pimpinan DPRD. Apa yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR sangat baik dan akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Fraksi," pungkas Sjaifuddin. ■

(ann,mp). Foto: Andri/hr

Kenaikan Listrik Korbankan 18,7 Juta Konsumen

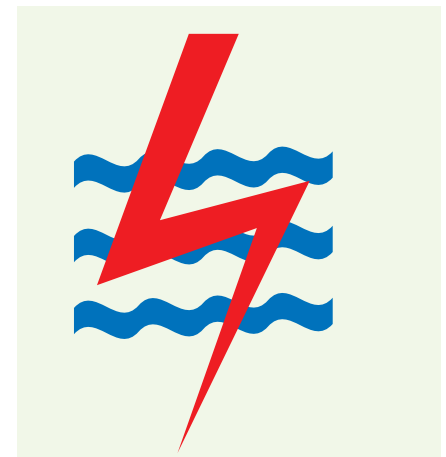
Kenaikan listrik untuk kelompok pengguna 900 volt ampere (watt) oleh pemerintah telah mengorbankan sekitar 18,7 juta konsumen. Kelompok ini tergolong rumah tangga miskin. Pemerintah harus memberi perhatian khusus atas kenaikan ini.

“Terus terang saya sangat tidak setuju dengan kenaikan itu, karena mengorbankan 18,7 juta pengguna. Kebanyakan mereka adalah pengguna rumah tangga. Ini bukan golongan orang mampu.” demikian ditegaskan Anggota Komisi VI DPR

RI Bambang Haryo Soekartono, Rabu (14/6), di ruang kerjanya. Bila jumlah 18,7 juta itu dikalikan 5 (jumlah dalam 1 keluarga), berarti ada sekitar 100 juta pelanggan yang dirugikan.

Saat ini, ucap Anggota F-Gerindra itu, untuk mendapatkan listrik 450 watt saja sulit, apalagi yang 900 watt. Akhirnya, masyarakat miskin seperti dipaksa untuk mendapatkan listrik 1300 watt yang jauh lebih mahal. Kategori miskin adalah mereka yang belum bisa makan empat sehat lima sempurna, belum punya rumah, atau sering berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. “Jangan karena punya motor lalu disebut kaya,” imbu Bambang.

Ditambahkan Bambang, dampak kenaikan listrik bisa sangat luas. Kualitas SDM di dunia pendidikan dan dunia usaha ikut menurun. Listrik sebagai sumber penerangan bisa berkurang, sehingga anak-anak sekolah sulit membaca. Begitu pula para karyawan di berbagai perusahaan bisa kehilangan pasokan



“Masyarakat miskin seperti dipaksa untuk mendapatkan listrik 1300 watt yang jauh lebih mahal”

listrik, sehingga produktivitasnya menurun. “Ini bisa mengancam kebodohan bagi anak-anak sekolah dan produktivitas karyawan,” kilah Bambang. ■

(mh,mp). Foto: Ojij/hr



Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo

Negara-negara Afrika Tertarik Sistem Politik Indonesia

Sistem politik, demokrasi, dan keparlemenan di Indonesia menarik perhatian delegasi National Defense College dari negara-negara Afrika. Indonesia tidak saja sebagai negara kaya, tapi sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia.

Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Johnson Rajagukguk mengungkapkan hal ini usai menerima delegasi lembaga pertahanan dari lima negara di kawasan Afrika. Selasa (13/6). Delegasi ini terdiri dari 15 orang dari lima negara di Afrika, yaitu Tanzania, Afrika Selatan, Boswana, Zimbabwe, dan Rwanda.

“Mereka tertarik mempelajari

sistem keparlemenan di Indonesia. Saya sudah jelaskan semua itu dan bagaimana demokrasi itu diimplementasikan. Ini membuat mereka tertarik dengan sistem yang ada di Indonesia,” ujar Johnson. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau juga menarik untuk dipelajari para delegasi. Apalagi, jabatan-jabatan publik di Indonesia dipilih secara langsung.

Sistem kerja di DPR RI tak luput

ditanyakan para delegasi, mulai dari sistem keterwakilan partai, keterwakilan perempuan, dan dana partai. “Mereka sangat antusias mempelajari sistem keparlemenan dan sistem politiknya. Pengisian jabatan-jabatan politik dipilih langsung. Ini hal yang menarik. Indonesia bukan semata-mata terkaya, tapi juga negara demokrasi terbesar di dunia,” tandas Johnson. ■

(mh,mp), Foto: Ariel/fhr



Suasana pertemuan Badan Keahlian Dewan DPR RI dengan delegasi National Defense College dari negara-negara Afrika



Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Kuba menerima kunjungan Kehormatan Dubes Kuba

GKSB DPR - Parlemen Kuba Dorong Kerjasama Sektor Kesehatan

Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Kuba menerima kunjungan Kehormatan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (14/06/2017).

Dalam pertemuan tersebut, anggota GKSB Eva Sundari menyampaikan beberapa hal terkait penandatanganan MoU antara Indonesia - Kuba, yang belum ditindaklanjuti. Diantaranya, kerjasama di bidang kesehatan. Mengingat, jumlah tenaga medis khususnya dokter, dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah populasi saat ini.

“Jika MoU di sektor kesehatan ini ditindaklanjuti, maka akan ada kemajuan karena pengelolaan sistem

edukasi di bidang kesehatan, Kuba lebih advance. Angka IPM mereka jauh lebih advance dibanding kita yang tidak di embargo,” ungkap Eva.

Selain di bidang kesehatan, kedua belah pihak sepakat untuk mendorong pemerintah masing-masing agar segera menindaklanjuti MoU kerjasama di bidang pertambangan dan pertanian (gula). Terkait hal itu, Dubes Nirsia Castro bahkan meminta pemerintah Indonesia segera mengirimkan utusannya untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis.

“Mereka meminta *enterprise* yang datang, jangan politisi, jangan menteri. Nah, kita akan minta Kadin untuk kesana membahas hal ini,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, Kuba cukup maju di bidang kesehatan. Oleh karena itu, parlemen sangat mendukung realisasi kerja sama kedua negara.

Selain pengembangan SDM, menurut Syamsul, lingkup kerja sama yang akan didorong antara lain, kerja sama medis dan produksi obat-obatan termasuk vaksin, kesehatan dan gizi ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker dan diabetes. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan bersama biofarmasi, bioteknologi serta nanotechnology.

“Kami berharap dengan ditandatanganinya MoU oleh kedua menteri kesehatan, akan tergambar rencana aksi dalam program Kemkes tahun 2018,” tandasnya. ■

(ann/sc), Foto: Iwan/hr

Fasilitas Mewah di Lapas Tidak Dibenarkan

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menyayangkan adanya sel mewah yang dihuni tahanan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. Ia menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab. Pemberian fasilitas itu tidak dibenarkan.

Hal itu menjadi temuan Badan Narkotika Nasional saat melakukan pengeledahan di sel Lapas Cipinang. Kepala BNN Budi Waseso menjelaskan, sel mewah ditemukan saat tim penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang BNN melakukan pengeledahan di ruang sel Lapas Cipinang pada tanggal 31 Mei 2017 yang dihuni terpidana atas nama Haryanto Chandra alias Gombak.

“Berarti Menteri Hukum dan HAM-nya tidak benar. Berarti apa yang dilakukan oleh Budi Waseso hari ini benar,” kata Desmond di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Desmond mengatakan, fasilitas-fasilitas sel mewah yang ada di lapas sudah menjadi rahasia umum, namun peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas oleh narapidana menambah parah masalah yang ada di dalam lapas. Hal itu diperparah dengan minimnya tindakan dari Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen

Pemasyarakatan saat ini.

“Kalau ini kemewahannya tertutup wajar-wajar saja, tapi ada yang luar biasa juga yang sudah terjadi, narkoba di dalam lapas, berarti kan luar biasa sekali. Ini saja tidak membuat Dirjen Lapas dan Menkumham melakukan tindakan-tindakan,” tegas Desmond.

Bahkan, politisi F-Gerindra itu mendesak agar Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, I Wayan Dusak segera dicopot. “Berarti di sini bukan sekedar lapasnya, berarti ini kan Dirjen Lapas harus diganti,” tegas politisi asal dapil Banten itu.

Menyikapi hal ini, Komisi III DPR berencana melakukan kunjungan ke Lapas Cipinang untuk meninjau langsung sel mewah yang ditemukan BNN dalam waktu dekat itu.

Sebagaimana diketahui, BNN menemukan ruangan sel mewah yang ditempati narapidana di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dalam sel itu ditemukan



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa

beberapa barang, seperti satu unit laptop (komputer jinjing), satu unit komputer tablet, empat unit telepon genggam dan satu unit token.

“Dalam pengeledahan tersebut terlihat situasi ruangan sel yang tidak seperti ruangan sel pada umumnya. Di ruangan tersebut terdapat AC, CCTV yang bisa memonitor setiap orang yang datang, wifi, akuarium ikan arwana dan menu makanan spesial,” ungkap Budi Waseso.

Haryanto Chandra alias Gombak adalah narapidana Lapas Cipinang kelas IA yang telah divonis 14 tahun penjara. Berdasarkan pengungkapan kasus tersebut petugas berhasil menyita uang dalam rekening tersangka LLT dan A, satu unit rumah di Jawa Timur serta satu unit mobil minibus tahun 2017. Dengan total aset yang disita dalam kasus ini sebesar Rp 9,6 miliar. ■

(sf), Foto: Andri/Inf



Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon

BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen

Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, Badan Intelijen Nasional (BIN) harus memiliki sistem cegah dini atau *early warning system* dalam menangkal kejahatan intelijen, terorisme, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga, kejahatan itu tidak sampai menelan korban.

“BIN harus memiliki informasi awal, sehingga kejahatan bisa mereka tangkal. Jangan sampai terjadi kejahatan atau terorisme, yang hingga menyebabkan korban. Itu menjadi tugas BIN untuk melihat apa yang terjadi sedini mungkin,” kata Nurdin, di sela-sela RDP dengan Kepala BIN beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Politisi F-Hanura itu pun mengingatkan, jangan sampai terjadi

kecolongan lagi, sehingga aksi terorisme sampai menimbulkan korban. Untuk itu, BIN harus memperkuat operasinya dan peralatannya. Ia pun memastikan, anggaran untuk BIN akan mendapatkan dukungan dari DPR.

Nurdin pun meminta BIN untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk oleh Presiden. Apalagi, kejahatan siber sudah merajalela dimana-

mana. Bahkan, berpotensi merusak sendi-sendi negara dalam pertahanan keamanan, bisnis telekomunikasi, hingga korporasi.

“Pemerintah kan sudah membentuk BSSN. Itu harus terkoordinasi dan terintegrasi yang baik antara institusi-institusi yang menangani siber tersebut, dengan koordinasi oleh Menkopolkam,” imbuh Nurdin.

Politisi asal dapil Sumatera Utara

itu menekankan, setiap insitusi yang terlibat dalam menangkal serangan siber, dirancang menjadi satu kesatuan yang kuat. Sehingga menjadi suatu kinerja yang kuat dalam menangkal serangan siber.

“Ini yang menjadi tugas dari semua pihak-pihak atau institusi yang terlibat, termasuk DPR. Bagaimana kedepannya membangun BSSN yang berdaya saing,” tutup Nurdin. ■

(sif/sc). Foto: Azka/hr

Lampung Siap Sambut Mudik Lebaran 2017

Mudik menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Kesiapan pemangku kepentingan diharapkan optimal dalam memberikan pelayanan kepada pemudik. Lampung, sebagai salah satu provinsi tujuan mudik ataupun kota transit bagi pemudik menuju Sumatera, dinilai siap menyambut Mudik Lebaran 2017.

mudik, tapi arus balik. Arus balik tidak sedramatis arus mudik. Saya melihat kesiapan Bakauheni sudah cukup. Antisipasi agar tidak terjadi penumpukan penumpang, pun sudah optimal,” nilai politisi asal dapil Jatim itu.

Sebelumnya, Kepala UBPU Bandara Radin Inten II Lampung, Satimin mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan secara optimal dalam menyambut Mudik Lebaran 2017.

Pihaknya telah melakukan sejumlah koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemprov Lampung, Dinas Perhubungan Lampung, hingga Polda Lampung beserta jajaran.

Terkait penambahan jumlah penerbangan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. Dalam sehari terdapat penambahan 12 penerbangan,

sehingga dalam satu hari ditambah dengan 31 penerbangan reguler, terdapat 43 penerbangan di Bandara Radin Inten II. Serta untuk mendukung Mudik Lebaran kali ini, pihaknya pun membuka posko di area bandara.

Selain Bandara Radin Inten II, Komisi V DPR juga meninjau Tol Terbanggi Besar - Bakauheni di Ruas Lematang - Kota Baru, Pelabuhan Bakauheni, serta mencoba langsung sarana dan prasarana Basarnas, khususnya SAR Lampung.

Kunspek ini juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR, diantaranya Salim Fakhry (F-PG), Rita Zahara (F-Gerindra), Bakri (F-PAN), dan Irmawan (F-PKB). ■

(sif/mp). Foto: Sojyan/hr

Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengatakan, Bandara Radin Inten II Lampung yang menjadi satu bandara tujuan pemudik ke Lampung, memiliki standar yang sudah sesuai. Kendati ada peningkatan penumpang, namun antisipasi dari otoritas bandara sudah semakin baik.

Demikian dikatakannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, Kamis (15/6/2017). Tiba di Lampung, Komisi V DPR langsung menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Lampung, UBPU Bandara Radin Inten II Lampung, Dirlantas Polda Lampung, ASDP Bakauheni, BMKG Lampung, SAR Lampung, Pelindo II, serta Kementerian Perhubungan.

“Dari fasilitas kebandaraan, Bandara Radin Inten II Lampung sudah sesuai. Untuk pengawasan dari otoritas bandara, semuanya sudah standar. Bahkan termasuk antisipasi masuknya narkoba, mereka sudah punya anjing pelacak. Tak ada masalah,” kata Sigit, usai pertemuan.

Politisi F-PKS itu menambahkan, walaupun ada peningkatan jumlah penumpang, kesiapan otoritas bandara sudah cukup optimal. Saat peninjauan pun, kondisinya tidak terlalu *crowded*.

Sementara untuk persiapan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sigit pun menilai sudah cukup baik.



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau Pelabuhan di Lampung terkait mudik lebaran 2017

Namun, masih ada catatan darinya yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh ASDP Bakauheni. Yakni terkait penataan pelabuhan.

“Catatan saya, karena angkutan-angkutan umum belum berada di tempat yang disediakan. Masih campur antara pengendara motor, orang jalan dan mobil. Sehingga tampak semrawut. Perlu lebih dirapikan lagi,” kritisinya.

Sigit melihat, yang harus diantisipasi Pelabuhan Bakauheni adalah saat arus balik. Pasalnya, kepadatan terjadi saat arus mudik, itupun di Pelabuhan Merak, Banten. Sehingga, dari sisi kepadatan saat arus mudik tidak terlalu berlebihan.

“Pelabuhan Bakauheni bukan tempat penumpukan penumpang untuk arus

Bandara Juanda Surabaya Siap Antisipasi Mudik Idul Fitri

Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur guna memastikan persiapan mudik menjelang hari raya idul fitri 1438 Hijriah agar dapat berjalan lancar. Dalam tinjauan langsung, Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan di Bandara Juanda. Turut serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi kunjungan kerja Komisi V.

Saat tiba di Bandara Juanda Surabaya di Terminal 1, rombongan Komisi V DPR langsung mendatangi Posko Terpadu Angkutan Lebaran 1438 H, rombongan sempat berbincang-bincang dengan penumpang pesawat.

“Bandara Juanda sampai saat ini berjalan dengan baik, penambahan pesawat, kelancaran dan keamanan semua sudah terpadu dalam operasi mudik lebaran,” kata Fary di Bandara Juanda, Kamis (15/6/2017).

Terkait persoalan tiket, situasi di Bandara Juanda tidak ada problem, kisaran harga tiket pun masih dalam keadaan terjangkau. “Masalah tiket tidak ada problem, tidak keberatan, masih terjangkau, secara umum bandara Juanda masih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ada, tinggal kita harus pelihara kelancaran dan keamanan,” imbuh Fary.

Sementara itu di tempat yang sama, Menhub meminta jajaran direksi bandara untuk melakukan antisipasi penumpukan

penumpang. Menurut Menhub, ada penambahan jam operasional.

“Saat ini Bandara Juanda masih bagus, nanti puncaknya tanggal 20 Juni sampai 23 Juni, kami minta ke direksi bandara untuk waspada karena ada penambahan dua jam operasi hingga pukul 24.00 WIB,” kata Menhub Budi.

“Selain ada penambahan operasional juga ada penambahan tenaga kerja, dan akan dilakukan pengawasan secara terbuka dan tertutup untuk kelancaran dan keamanan bandara,” jelasnya.

Selain Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, sejumlah legislator turut hadir yakni Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said serta beberapa anggota Komisi V Henky Kuniadi, Budi Yuwono, Sadarestuwati, Capt Anthon Sihombing, Gatot Sdjito, Andi Iwan Darmawan Aras, Willem Wandik, Sungkono, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Fatmawati Rusdi, dan Syarif Abdullah Alkadrie. ■

(hs:mp), Foto: Hendra/hr



Tim Kunspek Komisi V DPR meninjau Bandara Juanda Surabaya



Tim Kunspek Komisi X DPR berfoto bersama dengan jajaran Pemprov Kepri

Rasio Dosen, Sarpras dan Akreditasi Masalah Utama Perguruan Tinggi

Tiga hal penting yang menjadi temuan Tim Panitia Kerja Standar Nasional Perguruan Tinggi (Panja SN DIKTI) Komisi X DPR RI antara lain, rasio dosen, sarana dan prasarana serta masalah akreditasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunspek Panja SN DIKTI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Asisten II dan jajaran SKPD, beberapa Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Kepri, Ketua Kopertis Wilayah X Kepri, Perwakilan Kemenristek Dikti dan instansi terkait, di Graha Kepri Batam, Kamis (15/6/2017).

Sutan juga menambahkan, selain tiga masalah utama tersebut tak kalah penting adalah masih rendahnya minat terhadap penelitian/riset terutama di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta karena dukungan anggaran dari pemerintah relatif masih kecil.

"Ke depan kita dorong melalui Kemenristek Dikti untuk memberikan

dukungan porsi anggaran penelitian/riset yang lebih besar, karena penelitian akan meningkatkan kualitas dosen yang berimbas pada kemajuan sebuah perguruan tinggi," imbuh Sutan.

Politisi Gerindra ini juga prihatin jika melihat sarana dan prasarana antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sangat mencolok terutama di daerah (luar Jawa).

"Minimnya sarana dan prasarana menjadikan kemampuan mayoritas Perguruan Tinggi di Indonesia untuk memenuhi Standar Nasional Dikti menjadi tidak merata," jelas Sutan.

Legislator Dapil Jambi ini melihat ada ketimpangan mutu Perguruan Tinggi sehingga mayoritas institusi dan prodi terakreditasi 'C' (BAN-PT),

hanya sedikit prodi yang terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dan sebagainya). Akibatnya hanya ada 3 universitas di Indonesia yang masuk World Rank (QS) dari Top 500.

Wakil Rektor Universitas Batam Satryawan, mengusulkan agar SDM (dosen) yang kelebihan di PTN diperbantukan ke PTS. Sebagai contoh, mencari doktor S3 akuntansi di swasta sekarang sulit, karena kebanyakan memilih bekerja sebagai konsultan di perusahaan swasta.

"Saya juga berharap saat visitasi (datang memeriksa) BAN PT sebaiknya memiliki persepsi yang bisa memaklumi kondisi sarana dan prasarana PTS, tidak memaksakan harus sama dengan PTN," pungkas Satryawan.

Ikut serta dalam Tim Panja SN DIKTI Komisi X DPR yaitu Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Ida Bagus Putu Sukarta, Nuroji, Muslim, Yayuk Basuki, Dedi Wahidi, Zainul Arifin Noor, Mustafa Kamal, Yayuk Sri Rahayuningsih dan Dadang Rusdiana. ■

(ojfe.mpl) foto : naeturaji/hr



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Isterinya Deisti A Novanto dalam acara Safari Ramadhan di Brebes, Senin (19/6). Foto: Jaka

Tim Kunspek Pansus Pelindo II DPR dipimpin Wakil Ketua Teguh Juwarno meninjau Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Kamis (15/6). Foto: Runi



Tim Kunspek Komisi XI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Marwan Cik Hasan rapat dengan jajaran BI, OJK, dan TPID terkait pengendalian inflasi di Sumut
Jumat (09/06), Foto : Eka Hindra